

NOTA JAWABAN

PENJABAT BUPATI KUNINGAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN KUNINGAN DALAM MENANGGAPI 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DALAM ACARA : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUNINGAN.

PADA TANGGAL : 7 AGUSTUS 2024

-
- BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM;
 - ASSALAMU `ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH;
 - YANG KAMI HORMATI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN;
 - UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH SERTA KETUA
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN YANG KAMI HORMATI;
 - PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

TERIRING RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KITA PANJATKAN PUJI
DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA YANG TIDAK HENTI-
HENTINYA MELIMPAHKAN RAHMAT SERTA KARUNIA KEPADA KITA SEKALIAN,
SEHINGGA SAAT INI DAPAT MENGHADIRI ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM
KEADAAN SEHAT WAL' AFIAT. TIDAK LUPA PULA SHALAWAT DAN SALAM, SEMOGA
TETAP TERCURAH KEPADA JUNJUNAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SALALLAHU
ALAIHI WASSALAM, KELUARGA, PARA SAHABAT SERTA SEMUA UMMATNYA YANG
SHOLEH DAN SENANTIASA BERUSAHA UNTUK TAAT MENJALANKAN PERINTAH ALLAH
SERTA MENJAUHI SEGALA LARANGANNYA.

SELANJUTNYA SESUAI DENGAN JADWAL WAKTU YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA, PADA KESEMPATAN RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI SECARA RESMI KAMI AKAN MENYAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TELAH DISAMPAIKAN SECARA RESMI PADA KESEMPATAN RAPAT PARIPURNA DEWAN TANGGAL 7 AGUSTUS 2024.

SEBELUM KAMI MENYAMPAIKAN JAWABAN TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN, PADA KESEMPATAN INI KAMI INGIN MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN SETINGGI-TINGGINYA KEPADA FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TERHORMAT, YANG TELAH MEMBERIKAN TANGGAPAN YANG POSITIF DAN KONSTRUKTIF BERKENAAN DENGAN MATERI 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 YANG TELAH KAMI SAMPAIKAN SECARA RESMI PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2024, BAIK BERUPA PERTANYAAN, SARAN DAN HIMBAUAN YANG DIUNGKAPKAN DALAM BENTUK PANDANGAN UMUM. KESEMUANYA ITU MERUPAKAN MASUKAN YANG SANGAT BERHARGA SERTA AKAN MEMBERIKAN ARTI YANG SANGAT BESAR DALAM PENYEMPURNAANNYA.

SETELAH KAMI MENGAJI DAN MENELAAH SECARA SEKSAMA MATERI PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TERHORMAT, SECARA UMUM DAPAT KAMI SIMPULKAN BAHWA PADA DASARNYA SEBAGIAN BESAR FRAKSI DEWAN YANG TERHORMAT DAPAT MEMAHAMI TERHADAP PENYAMPAIAN SATU BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD.

MESKIPUN DEMIKIAN, KIRANYA TELAH MENJADI KEWAJIBAN KAMI UNTUK SENANTIASA MEMBERIKAN JAWABAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN TERHADAP BEBERAPA TANGGAPAN SERTA PERTANYAAN, SARAN DAN HIMBAUAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH MASING-MASING FRAKSI DEWAN YANG TERHORMAT YANG MENURUT PENGAMATAN KAMI MASIH MEMERLUKAN PENJELASAN LEBIH LANJUT, DISERTAI HARAPAN SEMOGA URAIAN PENJELASAN BERIKUT INI DAPAT DIJADIKAN BAHAN BAGI DEWAN YANG TERHORMAT SEHINGGA DAPAT MENUNJANG KELANCARAN DALAM PROSES PEMBAHASAN LEBIH LANJUT.

DALAM MEMBERIKAN JAWABAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN BERIKUT INI, DENGAN URUTAN SEBAGAI BERIKUT YAITU DIMULAI DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN-

NASDEM, FRAKSI PKB, FRAKSI PKS, FRAKSI GERINDRA BINTANG, FRAKSI PARTAI GOLKAR, FRAKSI PAN, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SERTA SELANJUTNYA DARI FRAKSI PPP.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN-NASDEM. KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI PDI PERJUANGAN-NASDEM, ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP RAPERDA RPJPD 2025-2045. SELANJUTNYA, ATAS SARAN DAN PERTANYAAN SERTA PENDAPAT BERKENAAN DENGAN TARGET DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RPJPD 2025-2045 BAHWA TARGET PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG YANG BERUPA INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM RANPERDA RPJPD MERUPAKAN HASIL PENYELARASAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PPN/KA BAPPENAS - MENDAGRI, SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA BARAT DAN HASIL PROSES PEMBAHASAN SERTA HARMONISASI TERHADAP BEBERAPA INDIKATOR YANG MERUPAKAN MANDATORI DARI TARGET PEMERINTAH PUSAT MELALUI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. PENYELARASAN INDIKATOR VISI, MISI, STRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN SUDAH MEMPERHATIKAN BEBERAPA TARGET PENDAPATAN YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. DALAM MENETAPKAN BEBERAPA INDIKATOR DIMAKSUD, KAMI SANGAT MEMPERHATIKAN PROYEKSI PENGGALIAN PAD YANG BERKELANJUTAN, SEPERTI DARI PEMANFAATAN SDA YANG *RENEWABLE* (ENERGI BARU TERBARUKAN DARI SUMBER DAYA AIR, PANAS BUMI, JASA LINGKUNGAN, DSB), POTENSI INVESTASI PIHAK SWASTA, KPBU MAUPUN JUGA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA.

BERKENAAN DENGAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL SERTA RENCANA INVESTASI, KAMI BERPENDAPAT BAHWA STRATEGI RPJPD UNTUK MENARIK KEMITRAAN DAN INVESTASI ADALAH DENGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN DEREGULASI, KEMUDAHAN PERIZINAN, AKSES KE *GREEN/LOW-COST FINANCING*, BANTUAN/SUBSIDI OPERASIONAL & KETENAGAKERJAAN, DAN INSENTIF FISKAL/NON FISKAL LAINNYA, TERUTAMA BAGI INVESTASI PADA SEKTOR-SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF DAN INKLUSIF (PERTANIAN, PERIKANAN, INDUSTRI), SEKTOR-SEKTOR EKONOMI HIJAU, DAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN. ASPEK KETATA RUANGAN, DALAM DRAFT REVISI RTRW SEBAGAI MITRA SPASIAL RPJPD TELAH DIKONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI SELUAS KURANG LEBIH 2.438,76

HA. PENETAPAN RUANG KPI DALAM RANPERDA RTRW KEDEPANNYA AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT USAHA INDUSTRI KHUSUSNYA INDUSTRI PADAT KARYA DAN RAMAH LINGKUNGAN (INDUSTRI HIJAU).

BERKENAAN DENGAN EFISIENSI DALAM BELANJA PEMERINTAH MELALUI OPTIMALISASI SUMBER DAYA SERTA PENGGUNAAN ANGGARAN SECARA EFEKTIF SERTA DALAM HAL MENYEIMBANGKAN KEBERLANJUTAN FISKAL JANGKA PENDEK, KAMI BERPENDAPAT BAHWA PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SERTA UPAYA REFORMASI BIROKRASI MENJADI KUNCI, SELAIN ITU DALAM RANGKA EFISIENSI INI BISA DITEKAN MELALUI PENYUSUNAN RENSTRA SKPD YG EFEKTIF DAN BERBASIS DARI IKU RPJPD DAN IKU RPJMD. SESUAI DENGAN PEDOMAN SURAT EDARAN BERSAMA ANTARA BAPPENAS-KEMENDAGRI SERTA HASIL KONSULTASI DENGAN PEMPROV JAWA BARAT BAHWA AGAR FISKAL DI PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN DIKELOLA DENGAN SANGAT HATI-HATI. BELANJA DIPRIORITASKAN PADA PROGRAM/KEGIATAN YANG BERSIFAT MANDATORI DAN BERKINERJA DENGAN CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN. SELAIN ITU UPAYA MENINGKATKAN PAD YANG DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN DAN KEMAJUAN EKONOMI MASYARAKAT, JUGA HARUS DIUPAYAKAN EKSPANSI KE POTENSI PAD YANG BERSUMBER DARI PEMANFAATAN SDA YANG BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN. SELAIN ITU UPAYA SINKRONISASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN YANG SUMBER PEMBIAYAANNYA LANGSUNG MELALUI DANA TRANSFER DAERAH HARUS TERUS DIDORONG DAN DIOPTIMALKAN MAUPUN BERSINERGI UNTUK MENDATANGKAN ALOKASI PROGRAM/KEGIATAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN.

BERKENAAN DENGAN MEKANISME AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM MEMANTAU KEMAJUAN PELAKSANAAN RPJPD SERTA STRATEGI AGAR RPJPD RELEVAN DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN SEKALIGUS MENJAWAB PERTANYAAN FRAKSI GERINDRA-BINTANG, KAMI BERPENDAPAT BAHWA SESUAI DENGAN AMANAT PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017, PENYUSUNAN PERENCANAAN BAIK YANG BERSIFAT JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH ATAUPUN TAHUNAN DIDASARKAN PADA HASIL EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERIODE SEBELUMNYA SERTA MEMPERTIMBANGKAN ISU AKTUAL BAIK TINGKAT DAERAH, NASIONAL ATAUPUN ISU GLOBAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUNINGAN SERTA PROYEKSI TERHADAP TARGET-TARGET CAPAIAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2045 SEHINGGA PENJABARAN DARI RPJPD DAPAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAPAT DIKAWAL

BERSAMA-SAMA AGAR CALON KEPALA DAERAH DAPAT MELAKSANAKAN KEBIJAKAN SESUAI AMANAT RPJPD 2025-2045.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN-NASDEM KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KARENA TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MASUKAN YANG POSITIF PADA RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PKB. KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI PKB, ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP RAPERDA RPJPD 2025-2045. SELANJUTNYA, ATAS SARAN DAN PERTANYAAN SERTA PENDAPAT BERKENAAN DENGAN KETENTUAN YANG MENGATUR DATA DAN INFORMASI YANG DIAJUKAN DALAM ACUAN PENYUSUNAN RPJPD, KAMI BERPENDAPAT BAHWA SESUAI DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TERKAIT SATU DATA INDONESIA MEMILIKI TUJUAN UNTUK MEMBERIKAN ACUAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAN TATA KELOLA DATA, PEMERINTAH DAERAH TELAH MENINDAKLANJUTI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 KE PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN KUNINGAN, DALAM STRUKTUR SATU DATA INDONESIA DI DAERAH TERDIRI DARI PEMBINA DATA STATISTIK TINGKAT DAERAH YAITU BPS KABUPATEN KUNINGAN, KOORDINATOR SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH YAITU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN WALIDATA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH YAITU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DALAM APLIKASI SATU DATA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH INI MASIH DALAM PENYEMPURNAAN DAN JIKA SUDAH BERJALAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH DIJADIKAN SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERMASUK DALAM PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD DAN RKPd.

BERKENAAN DENGAN SARAN PENDAPAT BERKENAAN DENGAN PERLUNYA KLAUSUL KHUSUS MENGENAI FORMAT STANDAR PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI DAN PERLUNYA KLAUSUL KHUSUS MENGENAI HAL TERSEBUT, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI BERKENAAN DENGAN HAL TERSEBUT DAN KAMI AKAN MELAKUKAN KAJIAN KEMBALI BERSAMA-SAMA MELIBATKAN SELURUH UNSUR PEMBENTUK PADA PEMBICARAAN TINGKAT LANJUT UNTUK DILAKUKAN PENYEMPURNAAN.

BERKENAAN DENGAN PERLUNYA INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DALAM RPJPD 2025-2045 SERTA PERLUNYA PENYESUAIAN SOTK TIAP PERANGKAT DAERAH DALAM MENGAKSELERASI PROGRAM DALAM RPJPD 2025-2045, KAMI BERPENDAPAT BAHWA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERANGKAT DAERAH HARUS MAMPU MENDETEKSI PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. DI SAMPING ITU, PERUBAHAN INI DITUNTUT UNTUK MAMPU MEMBERIKAN NILAI MANFAAT DAN MENJADI STRATEGIS BAGI PERANGKAT DAERAH. SUBSTANSI DALAM PENYESUAIAN SOTK DIMAKSUDKAN UNTUK MEMPERKUAT DAN MEMPERBAIKI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENAMBAHAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH. HAL INI SESUAI DENGAN AMANAT DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KARENA TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MASUKAN YANG POSITIF PADA RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERIKUT INI KAMI AKAN MENANGGAPI TERHADAP BEBERAPA HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH FRAKSI PKS. KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA FRAKSI PKS.

BERKENAAN DENGAN SARAN DAN MASUKAN, KAMI TELAH MERANGKUM KE DALAM BEBERAPA ASPEK MAKRO YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN NILAI-NILAI MORAL KEAGAMAAN YANG BERDASARKAN PANCASILA SILA PERTAMA DAN PEMBUKAAN UUD TAHUN 1945, KEMUDIAN DALAM ASPEK PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT, PENANGGULANGAN PENGANGGURAN TERBUKA, KEADILAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PELINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN, REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, KAMI TELAH MENGAJI SARAN DAN PANDANGAN TERSEBUT SECARA SEKSAMA DAN MENDALAM SERTA PADA PRINSIPNYA KAMI SEPENDAPAT DENGAN MASUKAN TERSEBUT BAHWA DALAM RPJPD 2025-2045 INI MERUPAKAN KEBIJAKAN SECARA MAKRO YANG SUDAH TERMUAT DALAM RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045 YANG AKAN DIURAIKAN SECARA RINCI DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN RENCANA JANGKA TAHUNAN, KAMI BERHARAP MASUKAN-MASUKAN TERSEBUT DAPAT DIWUJUDKAN DENGAN

MEMBANGUN SINERGI DAN KOMITMEN BERSAMA BAIK PEMERINTAHAN DAERAH DAN STAKEHOLDER TERKAIT.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PKS KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KARENA TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MASUKAN YANG POSITIF PADA RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERIKUT INI KAMI AKAN MENANGGAPI TERHADAP BEBERAPA HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH FRAKSI GERINDRA-BINTANG.

BERKENAAN DENGAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN SERTA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEKALIGUS MENJAWAB PERTANYAAN DARI FRAKSI PPP, KAMI BERPENDAPAT BAHWA PERSENTASE KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 SEBESAR 1,42 PERSEN DAN MENGALAMI PENURUNAN 1,48 PERSEN DARI TAHUN 2022. STRATEGI DALAM PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DENGAN FOKUS INTERVENSI PADA DESIL TERENDAH YAITU DESIL 1 YANG MASUK DALAM KATEGORI EKSTREM. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN PENINGKATAN JARINGAN PENGAMAN SOSIAL BAGI KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN AGAR TIDAK TERPEROSOK LEBIH JAUH KE DALAM KEMISKINAN SERTA MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MELALUI BANTUAN PERMODALAN UMKM. SELANJUTNYA BERKAITAN DENGAN IPM, IPM TERDIRI DARI 3 KOMPONEN PENYUSUN YAITU KUALITAS KESEHATAN, KUALITAS PENDIDIKAN DAN DAYA BELI. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENINGKATKAN IPM YAITU DENGAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN FASILITAS KESEHATAN, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DENGAN MENDORONG ANGKA RLS MELALUI PKBM (PAKET A,B,C) DAN JUGA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAYA BELI MASYARAKAT.

BERKENAAN DENGAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPERKENALKAN SENI DAN BUDAYA KUNINGAN UPAYA UNTUK MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN SENI BUDAYA YANG BISA DIKOLABORASIKAN DI DALAM BEBERAPA KALENDER WISATA SEHINGGA MENJADI SUATU KESATUAN DALAM BAGIAN UTAMA PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA.

BERKENAAN DENGAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM, KAMI SEPAKAT BAHWA UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MEMPERHATIKAN AZAS KELESTARIAN ALAM, KEBERMANFAATAN SERTA MENDORONG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG RENEWEBLE, PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN UNTUK MENJADI PENOPANG UTAMA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI DI KABUPATEN KUNINGAN.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA-BINTANG KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KARENA TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MASUKAN YANG POSITIF PADA RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERIKUT INI KAMI AKAN MENANGGAPI TERHADAP BEBERAPA HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH FRAKSI PARTAI GOLKAR.

BERKENAAN DENGAN SARAN TINDAKAN TARGET MAUPUN SASARAN SERTA TOLOK UKUR YANG JELAS UNTUK DICAPAI DALAM PEMBANGUNAN, KAMI BERPENDAPAT BAHWA DALAM PENYUSUNAN RPJPD INI KAMI TELAH MELAKUKAN ANALISIS TERKAIT TARGET MAUPUN SASARAN SERTA INDIKATOR PEMBANGUNAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN UNTUK DICAPAI VISI MISI PEMBANGUNAN. SELAIN ITU RPJPD INI DISUSUN BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN MULAI DARI KALANGAN PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT UMUM YANG DIHIMPUN MELALUI JARING ASPIRASI. KAMI JUGA AKAN TERUS MELAKUKAN EVALUASI TERKAIT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUNINGAN DALAM 20 TAHUN KE DEPAN UNTUK MENJAGA KONSISTENSI PEMBANGUNAN.

BERKENAAN DENGAN LANGKAH-LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER, TERUTAMA INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER, KAMI BERPENDAPAT BAHWA SAAT INI ANGKA IPG KABUPATEN KUNINGAN MENGALAMI PENINGKATAN SETIAP TAHUNNYA, TAHUN 2022 ANGKA IPG KABUPATEN KUNINGAN SEBESAR 87,17 DAN MENGALAMI PENINGKATAN DI TAHUN 2023 MENJADI 87,31, SEDANGKAN ANGKA IDG MENGALAMI PENURUNAN DARI 73,67 DI TAHUN 2022 MENJADI 73,47 DI TAHUN 2023, DAN HAL TERSEBUT MENJADI CONCERN BAGI KAMI UNTUK MENINGKATKAN IPG DAN IDG DI KABUPATEN KUNINGAN.

DALAM DOKUMEN RPJPD IPG DAN IDG MASUK PADA TRANSFORMASI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI DAN MASUK PADA ARAH PEMBANGUNAN PENINGKATAN KAPASITAS KELUARGA, PEMUDA DAN KESETARAAN GENDER. KESETARAAN GENDER MENJADI SALAH SATU FOKUS PEMERINTAH KAB. KUNINGAN, TERKAIT DENGAN HAL TERSEBUT TERDAPAT UPAYA AFIRMATIF YANG AKAN

DILAKUKAN ANTARA LAIN MELALUI PEMBERIAAN PERANAN AKTIF DALAM SETIAP LINI KEHIDUPAN SEPERTI BIDANG PENDIDIKAN, PENINGKATAN EKONOMI MAUPUN POLITIK.

BERKENAAN DENGAN HARAPAN, SARAN DAN MASUKAN BERKAITAN DENGAN KONSISTENSI PELAKSANAAN RPJPD 2025-2045, PEMANFAATAN SUMBERDAYA, MENJAGA NILAI DAN MORAL SERTA ETIKA MASYARAKAT, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG DI GUNUNG CIREMAI, DAN PERSOALAN PENGANGGURAN, KAMI BERPENDAPAT BAHWA HARAPAN DAN MASUKAN YANG DISAMPAIKAN PADA DASARNYA ADALAH DEMI KEBAIKAN KUNINGAN, SETELAH KAMI MENKAJI SECARA SEKSAMA, KAMI BERKEYAKINAN BAHWA DALAM RPJPD 2025-2045 YANG KAMI SUSUN TELAH MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS BERKAITAN DENGAN HAL TERSEBUT, BAHWA PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045 DIDASARKAN ATAS LANGKAH-LANGKAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DALAM PENYUSUNAN RPJPD SALAH SATU SYARAT DALAM HAL EVALUASI RPJPD OLEH KEMENTERIAN ADALAH DOKUMEN KLHS SERTA SEJALAN DENGAN DOKUMEN RTRW. SELANJUTNYA BERKAITAN DENGAN PENGURANGAN JUMLAH PENGANGGURAN SEKALIGUS MENJAWAB PERTANYAAN DARI FRAKSI PAN TERKAIT MENGATASI PERMASALAHAN PENGANGGURAN, PERMASALAHAN TERSEBUT TETAP MENJADI PERHATIAN KAMI PADA SETIAP LEVEL PERENCANAAN (BAIK PERENCANAAN JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN), TINGKAT PENGANGGURAN DALAM RPJPD DITUANGKAN DALAM INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN SESUAI MANDAT PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA DENGAN TARGET AKHIR UNTUK KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2045 SEBESAR 5,67 - 6,91 PERSEN. PENGURANGAN PENGANGGURAN SECARA RINCI AKAN DITERJEMAHKAN DALAM RPJMD DAN RKPD. SECARA UMUM STRATEGI UNTUK MENGURANGI JUMLAH PENGANGGURAN DILAKUKAN MELALUI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS ANGKATAN KERJA UNTUK DAPAT BERSAING DI PASAR KERJA, MENGGALAKAN KEGIATAN EKONOMI INFORMAL, MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA DENGAN MEMBUKA INVESTASI BAGI INDUSTRI RAMAH LINGKUNGAN, SERTA MEMBUAT/MEMPERBAIKI REGULASI YANG BERPIHAK PADA PENGEMBANGAN INVESTASI DI DAERAH.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KARENA TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MASUKAN YANG POSITIF PADA RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERIKUT INI KAMI AKAN MENANGGAPI TERHADAP BEBERAPA HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH FRAKSI PAN.

BERKENAAN DENGAN POTENSI PARIWISATA KUNINGAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA RPJPD 2025-2045, KAMI BERPENDAPAT BAHWA SESUAI DENGAN PERTUMBUHAN PDRB SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA (TERMASUK DIDALAMNYA PENYEDIAAN AKOMODASI, MAKAN DAN MINUM) DALAM PDRB MENUNJUKAN PERTUMBUHAN YANG POSITIF, WALAUPUN SAAT INI SEKTOR TERSEBUT BELUM MENJADI SEKTOR PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN KABUPATEN KUNINGAN NAMUN DENGAN POTENSI SDA YANG ADA SERTA BEBERAPA FAKTOR LINGKUNGAN PENDUKUNG KAMI BERHARAP DENGAN RPJPD YANG MENGARAHKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA DAPAT MENJADI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

BERKENAAN DENGAN PERENCANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUNINGAN SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI RENCANA DETAIL TATA RUANG, KAMI SETUJU BAHWA KEBERADAAN RDTR MEMILIKI PERAN PENTING DALAM PENATAAN RUANG SECARA DETAIL, NAMUN DALAM PENYUSUNANNYA RDTR TERSEBUT MEMERLUKAN RTRW SEBAGAI DASAR DALAM MEMBERIKAN ARAHAN STRATEGIS TERKAIT PENATAAN RUANGNYA. SEPERTI YANG DIKETAHUI BERSAMA, PROSES RAPERDA RTRW TELAH MEMASUKI LOKET KEMENTERIAN ATR BPN UNTUK DIBAHAS LINTAS SEKTOR YANG SELANJUTNYA AKAN MELALUI TAHAPAN EVALUASI DAN PENETAPAN PERDA. KEDEPANNYA, SETELAH RTRW DITETAPKAN AKAN DITINDAKLANJUTI DENGAN PENYUSUNAN RDTR KHUSUSNYA PADA WILAYAH PERKOTAAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN LOKAL DAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN. RDTR TERSEBUT AKAN DITETAPKAN MELALUI PERATURAN BUPATI. PADA DRAFT RTRW, PENATAAN RUANG UNTUK WILAYAH PERKOTAAN DIARAHKAN UNTUK DISUSUN RDTR, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN; SARANA PRASARANA KESEHATAN; SARANA PRASARANA EKONOMI DAN BUDAYA; PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN; SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI; PENYEDIAAN PEMENUHAN RTH PUBLIK 20%; DAN PENGADAAN TANAH UNTUK RTH. KUNINGAN TIMUR AKAN DIKEMBANGKAN UNTUK KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI) KHUSUSNYA PADA LAHAN-LAHAN TIDAK PRODUKTIF YANG

SESUAI DENGAN KRITERIA TEKNIS KPI DALAM PERATURAN MENTERI INDUSTRI NOMOR 30 TAHUN 2020 YANG DIAKOMODIR DALAM RTRW.

BERKENAAN DENGAN STRATEGI DALAM RPJPD 2025-2045 BERKAITAN DENGAN HUTANG AKIBAT TUNDA BAYAR SEKALIGUS MENJAWAB PERTANYAAN DARI FRAKSI PPP, KAMI BERPENDAPAT BAHWA UNTUK MENGATASI PERSOALAN TERSEBUT, PERLU DILAKUKAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH YANG REALISTIK SERTA MELAKSANAKAN BELANJA BERDASARKAN SKALA PRIORITAS YANG TERUKUR.

BERKAITAN DENGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG BERADA DI KABUPATEN KUNINGAN, KAMI BERPENDAPAT BAHWA RPJPD 2025-2045, RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL TELAH DIATUR DALAM RTRW NASIONAL DAN RTRW PROVINSI JAWA BARAT. BERDASARKAN SURAT DIREKTUR JALAN BEBAS HAMBATAN KEMENTERIAN PUPR NOMOR PA.01.03-BK/13 TANGGAL 20 APRIL 2022, RENCANA JALAN TOL CIREBON KUNINGAN INDIKASI PENANGANANNYA DILAKSANAKAN PADA 2030-2034 SEMENTARA UNTUK KUNINGAN-TASIKMALAYA INDIKASI PENANGANANNYA 2035-2039. SELAIN ITU PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR SELATAN YANG MERUPAKAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL TELAH MASUK KE DALAM ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN KUNINGAN BERUPA PENGELOLAAN, AKSELERASI, PENGUATAN DAN PERWUJUDAN JALAN DAERAH DAN JALAN DESA.

BERKENAAN DENGAN STRATEGI RPJPD 2025-2045 DALAM HAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUBSIDI DAN PABRIK PADA LAHAN PRODUKTIF, KAMI BERPENDAPAT BAHWA RPJPD MERUPAKAN DOKUMEN YANG SIFATNYA A SPASIAL, SEMENTARA UNTUK PENATAAN RUANG DIATUR DALAM RTRW YANG MERUPAKAN MATRA SPASIAL DARI RPJPD ITU SENDIRI. OLEH KARENANYA, PENGATURAN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUBSIDI DAN PABRIK DIATUR DALAM KETENTUAN UMUM ZONASI RTRW DAN KESEPAKATAN FPRD.

BERKENAAN DENGAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDONGKRAK DAYA BELI MASYARAKAT SERTA DALAM HAL PEMBERDAYAAN UMKM, KAMI BERPENDAPAT BAHWA DALAM RPJPD TAHUN 2025-2045 KEBIJAKAN EKONOMI DIARAHKAN PADA PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT, SEKALIGUS MENGACU PADA MISI KE-2 YAITU MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG TANGGUH BERBASIS POTENSI DAN KEUNGGULAN LOKAL. SEMENTARA ITU KEBIJAKAN NON EKONOMI DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA MISKIN MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETAHANAN PANGAN, SOSIAL, DAN PRASARANA DASAR. PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI YANG DILAKUKAN DIANTARANYA

ADALAH PENGEMBANGAN UMKM, PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN (PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN) DENGAN TARGET SASARAN PENDUDUK/PETANI MISKIN. PROGRAM PENINGKATAN SKILL PADA BALAI LATIHAN KERJA SERTA UPAYA MENUMBUHKAN INVESTASI YANG DAPAT MENYERAP TENAGA KERJA KHUSUSNYA PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KUNINGAN DAN INI JUGA MELIBATKAN PERAN SERTA SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT.

BERKAITAN DENGAN LANGKAH STRATEGIS DALAM MENGATASI PERMASALAHAN STUNTING SEKALIGUS MENJAWAB PERTANYAAN DARI FRAKSI PPP, KAMI BERPENDAPAT BAHWA STUNTING MENJADI PERHATIAN DALAM RPJPD KABUPATEN KUNINGAN YANG MANA TERMASUK KEDALAM AGENDA TRANSFORMASI SOSIAL DENGAN ARAH PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING SDM. STUNTING MENJADI PENTING HAL INI KARENA DAPAT MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK DIMASA DEPAN. TERDAPAT ARAH KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN YAITU UPAYA PROMOTIF-PREVENTIF SERTA BUDAYA PERILAKU SEHAT, PENINGKATAN AKSES SANITASI DAN AIR MINUM, PENINGKATAN KUALITAS FASILITAS KESEHATAN SERTA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI PADA TINGKAT INDIVIDU, KELUARGA DAN LINGKUNGAN.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PAN KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KARENA TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MASUKAN YANG POSITIF PADA RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERIKUT INI KAMI AKAN MENANGGAPI TERHADAP BEBERAPA HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

BERKENAAN DENGAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KEMISKINAN, GINI RASIO DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR, KAMI BERPENDAPAT BAHWA TERDAPAT BEBERAPA UPAYA DAN STRATEGI YANG TERTUANG DALAM DOKUMEN RPJPD KAB. KUNINGAN TERUTAMA DALAM MENGATASI PERSOALAN KEMISKINAN, GINI RATIO DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH ADALAH DENGAN MELIHAT 17 ARAH PEMBANGUNAN KAB.KUNINGAN YAITU AGENDA TRANSFORMASI SOSIAL (PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT) SERTA MENDUKUNG UPAYA PEMBERDAYAAN MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI DENGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

EKONOMI MELALUI SEKTOR UNGGULAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KLUSTER PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL. SELAIN HAL ITU PERLU DIDUKUNG JUGA OLEH KEMANTAPAN DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR TERUTAMA INFRASTRUKTUR YANG SIFATNYA PELAYANAN DASAR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SEPERTI INFRASTRUKTUR JALAN, IRIGASI DLL NYA UNTUK MENINGKATKAN AKSES KETERBUKAAN DAN MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN.

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TERCANTUM DALAM MISI MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKEADILAN, DENGAN ELEMEN KUNCI DALAM PEMBANGUNAN BERDAYA SAING TINGGI UNTUK MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MODERN DAN EFISIEN INFRASTRUKTUR YANG MODERN DAN EFISIEN, SEPERTI JARINGAN TRANSPORTASI YANG BAIK, KOMUNIKASI YANG CANGGIH, DAN ENERGI YANG ANDAL, SANGAT PENTING UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BAIK DAPAT MENINGKATKAN KONEKTIVITAS REGIONAL YANG MERUPAKAN ASPEK PENTING DALAM PERKEMBANGAN SUATU WILAYAH.

ADAPUN LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH SESUAI DENGAN RPJPD ADALAH:

1. PENINGKATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKEADILAN;
2. AKSELERASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKEADILAN;
3. OPTIMALISASI PEMBANGUNAN WILAYAH; DAN
4. PERWUJUDAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKEADILAN.

BERKENAAN DENGAN AKSESIBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MEMILIKI DAYA SAING SEKALIGUS MENJAWAB PERTANYAAN DARI FRAKSI PPP, KAMI BERPENDAPAT BAHWA DALAM MEWUJUDKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN KUALITAS KESEHATAN TERUTAMA MASALAH GIZI BURUK DAN STUNTING YANG MERUPAKAN SALAH SATU YANG DAPAT MENGHAMBAT KONDISI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MANUSIA OLEH KARENA ITU PERLU DILAKUKAN SEJAK DINI DALAM MEMPERSIAPKAN SDM YANG UNGGUL. SELAIN ITU MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEPERTI KOMPETENSI DAN KEAHLIAN TENAGA KERJA MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA DALAM MEMPERSIAPKAN SDM YANG UNGGUL. HAL TERSEBUT MENJADI PENTING KARENA MENJADI MODAL DASAR DALAM MEMPERSIAPKAN DIRI DALAM PERSAINGAN DALAM DUNIA KERJA. SELANJUTNYA UNTUK LEBIH MEMANTAPKAN KUALITAS SDM

TERUTAMA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DENGAN DILAKUKANNYA UPAYA PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENCARI KERJA SERTA MENJAWAB KEBUTUHAN SDM YANG DIBUTUHKAN OLEH PERUSAHAAN.

BERKENAAN DENGAN SARAN, PENDAPAT DAN PERTANYAAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KARENA TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN MASUKAN YANG POSITIF PADA RAPERDA TENTANG RPJPD 2025-2045

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERIKUT INI KAMI AKAN MENANGGAPI TERHADAP BEBERAPA HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH FRAKSI PPP.

BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TELAH DILAKSANAKAN DI KABUPATEN KUNINGAN BAHWASANYA KAMI OPTIMIS BAHWA PADA RPJPD 2025-2045, PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR SELATAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN MELIBATKAN STAKEHOLDER DAN TERUS MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN PIHAK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SECARA SIMULTAN DAN INTENSIF.

- YANG KAMI HORMATI PIMPINAN, PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIAN JAWABAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN BERKENAAN DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN YANG TERHORMAT DALAM MENANGGAPI 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

SELANJUTNYA KAMI MENYAMBUT BAIK TERHADAP SEMUA SARAN DAN HIMBAUAN DARI DEWAN YANG TERHORMAT BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN SATU BUAH PERATURAN DAERAH APABILA TELAH DITETAPKAN, MUDAH-MUDAHAN KESEMUANYA ITU AKAN DAPAT KAMI LAKSANAKAN.

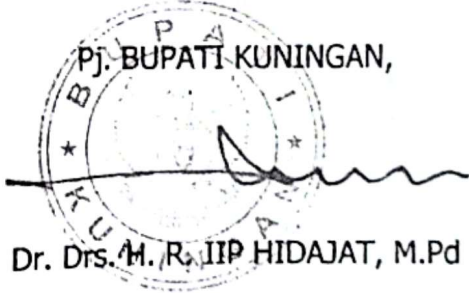
TERHADAP HAL-HAL LAINNYA YANG BERSIFAT SARAN UNTUK PENYEMPURNAAN SATU RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045, BAIK YANG

MENYANGKUT TEKNIS REDAKSIONAL PENYEMPURNAAN PASAL DAN AYAT, SERTA KEMUNGKINAN TERDAPAT PERTANYAAN YANG BELUM SEMPAT KAMI JAWAB, KIRANYA SEPENDAPAT UNTUK DIBAHAS DAN DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KESEMPATAN RAPAT PANITIA KHUSUS.

TERIMAKASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKHILAFAN DAN KEKURANGANNYA.

AKHIRNYA MARILAH KITA BERSAMA BERDO'A SEMOGA SETIAP USAHA YANG DILAKSANAKAN SENANTIASA MENDAPAT PETUNJUK, BIMBINGAN SERTA RIDHO ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA.

- BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH.
- WASSALAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Pj. BUPATI KUNINGAN,

Dr. Drs. M. R. IIP HIDAJAT, M.Pd